

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Agnes Fitryantica. 2019. *Harmonisasi Peraturan PerUndang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*. Jurnal Gema Keadilan., vol. 6, edisi 3, Oktober-November 2019
- Bayu Dwi Anggono, 2020, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem PerUndang-undangan Indonesia*, Vol. No. 1
- Bayu Dwi Anggon, 2019, dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia*, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2020 *Omnibus Law Dan Penerapan Di Indonesia*, Konpress, Jakarta
- Maria Farida Indrati. 2013. *Ilmu PerUndang-undangan* Kanisius, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya
- R. Soeroso. 2011 *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Rachmat Trijono, 2020 *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Papas Sinar Sinanti*, Jakarta
- Roy Marthen Moonti, 2017. *Ilmu PerUndang-undangan*, Keretakupa, Makasar

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

C. Sumber Lain

- Achmad Teguh Wahyudin, Konsep Implementasi Omnibus Law Pada Sistem PerUndang-undangan.
https://www.academia.edu/41537217/MAKALAH_OMNIBUS_LAW
- Agustiyanti, Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturn-hambat-ri-ikuti-perubahan-global>

Arum Sutrisni Putri, Peraturan perundang-undangan : jenis dan hierarki, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/pe-raturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya?page=all>

Bivitri Susanti, dalam jumpa pers “RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru" Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat, Skema „Omnibus Law’ Sangat Sektoral, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26322/t/Skema+%E2%80%99Omnibusw%E2%80%99+Sang+at+Sektoral>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>

<https://www.beritasatu.com/investor/500416-menyoyal-omnibuslaw.html>.

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RIDalam Penyelenggaraan Negara. Disertasi, (Jakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Tahun 1990

CNN Indonesia, *Demo Tolak Omnibus Law di Gelar di Sejumlah Daerah Kemarin,*

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012204822-20-557608/demo-tolak-omnibus-law-digelar-di-sejumlah-daerah-kemarin> ,diakses pada tanggal 6 Februari, pukul 16.28 WIB.

Farihan Aulia dan Sholahuddin Al-Fatih. 2017. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir*. Jurnal *Legality*, vol. 25, No. 1, Maret 2017

Firman Freaddy Busroh. 2017. *Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*. Jurnal

Focus Group Discussion (FGD), “Penyempurnaan dan Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan terkait Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum”, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Unit Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, 31 Juli 2019.

Himantara, perancangan peraturan perUndang-undangan (Legal Drafting), <http://abhimantara.blogspot.com/2015/03/perancangan-peraturan-perundang.html?m=1#:~:text=Perancangan%20peraturan%20perUndang-undangan%2FLegal,%2C%20pengesahan%2C%20pengundangan%20dan%20penyebarluasan>

<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>,

<https://www.beritasatu.com/investor/500416-menyoal-omnibuslaw>

Mochamad Januari Rizki, 5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui Omnibus Law

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas dan Omnibus Law, dipublikasikan pada 21 November 2019, <https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/>

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK: Jakarta

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2011, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, dalam A. Ahsin Thohari, “Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8

Sarah Safira Aulianisa. 2019. *Menakar Kompabilitas Transplantasi Omnibus Law dalam Konteks Peraturan PerUndang-undangan dengan Sistem Hukum Indonesia*. Paper dipresentasikan di Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan